

**Peran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sebagai Acuan Laporan Keuangan pada Instansi**

**Annisya Verena Justicia<sup>1</sup>, Rita Myrna<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Universitas Padjajaran Bandung<sup>1,2</sup>

annisya20004@mail.unpad.ac.id

**ABSTRACT**

*What is meant by IKPA? The meaning of IKPA (Budget Implementation Performance Indicators) is based on the Regulation of the Director General of Treasury, namely Regulation Number PER-5/PB/2022 which discusses IKPA or Budget Implementation Performance Indicators, which is an indicator determined by the Ministry of Finance, namely the State General Treasurer (BUN) which has functions as a measuring tool regarding the quality of performance in implementing budgets for State Ministries/Institutions through the quality of budget planning implementation, the quality of budget implementation, and the quality of the results of implementing a financial report budget in each period. In principle, the IKPA assessment is carried out with the aim of assessing the performance of budget implementation in 1 period, namely one year. In the process of monitoring to create maximum performance achievements, the Agency Office carries out mentoring activities and an evaluation process for IKPA work units regarding the implementation of the budget that has been provided by the Directorate General of Treasury which is integrated into Online Mentoring (OM) which will be realized in a form of measurement and describes the performance of the work unit regarding the quality of budget planning, the quality of the budget implementation process, and also the quality of the results of budget implementation. Based on the applicable law in Minister of Finance Regulation Number 195/PMK.05/2018, which contains Monitoring, Supervision and Evaluation regarding the Expenditure Budget Implementation process that has been implemented. The second regulation is Regulation of the Director General of Treasury Number PER-5/PB/2022 which discusses various Technical Instructions for Assessment of Performance Indicators for Ministry/Agency Budget Implementation. Budget Implementation Performance Indicators have many aspects and also IKPA Indicators that must be known, namely Quality of Budget Planning, Quality of Budget Implementation, Quality of Implementation Results*

**Keywords:** Budget Implementation Performance Indicators, Financial Reports, indicators

**ABSTRAK**

Apa yang dimaksud dengan IKPA? Pengertian dari IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan yaitu Peraturan Nomor PER-5/PB/2022 yang membahas tentang IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan suatu Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu Bendahara Umum Negara (BUN) yang memiliki fungsi sebagai alat ukur tentang kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan suatu anggaran laporan keuangan di setiap periodenya. Pada prinsipnya penilaian IKPA dilaksanakan yang bertujuan untuk penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada 1 periode yaitu dalam satu tahun. Dalam proses mengawal untuk menciptakan

capaian kinerja yang maksimal, Kantor Instansi melaksanakan kegiatan *mentoring* dan proses evaluasi kepada IKPA satker terhadap pelaksanaan anggaran yang sudah disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada *Online Mentoring* (OM) yang akan diwujudkan suatu bentuk ukuran dan menggambarkan kinerja satuan kerja tentang kualitas perencanaan anggaran, kualitas proses pelaksanaan anggaran, dan juga kualitas tentang hasil dari pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Hukum yang berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 yaitu berisi tentang *Monitoring* pengawasan dan Evaluasi mengenai proses Pelaksanaan Anggaran Belanja yang telah dilaksanakan. Peraturan yang kedua adalah Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 yang membahas tentang macam Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Instansi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran memiliki banyak aspek dan juga Indikator IKPA yang wajib untuk diketahui yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Hasil Pelaksanaan

**Kata kunci:** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Laporan Keuangan, indikator

## **PENDAHULUAN**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran memiliki tujuan yang sangat penting dalam sebuah Instansi yaitu berfungsi sebagai kelancaran atas pelaksanaan anggaran, IKPA juga memiliki tujuan untuk mendukung manajemen kas, serta meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan dalam suatu Instansi. IKPA digunakan dalam rangka *monitoring* dan evaluasi belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga, dan memberikan penghargaan.

Laporan keuangan bertujuan guna sumber dukungan penguatan keputusan yang diambil keluar masuknya serta terkhusus pada aspek keuangan perusahaan, menjadi informasi relevan dan akurat terkait status finansial, pelaksanaan anggaran dan saldo lebih, laporan arus kas, hasil pengoperasian serta dinamisasi ekuitas dalam sebuah laporan untuk memberikan manfaat dan informasi guna penggunaannya pada pembuatan serta evaluasi keputusan perihal alokasi dana masuk dan keluar suatu perusahaan. Disamping itu, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai akuntabilitas kinerja sehubungan dengan tiga topik utama pembahasan: akuntabilitas kinerja, pencapaian indikator kinerja, dan pencapaian sasaran strategis. Untuk memberikan ringkasan pencapaian kinerja selama periode waktu tertentu, setiap topik yang dibahas akan dibahas sesuai dengan kondisi terkini. Laporan Keuangan perusahaan yang krusial guna mengetahui suatu kondisi dalam Perusahaan tersebut. Laporan ini mencakup beragam bagian yaitu laba dan rugi, arus kas, perubahan modal serta keuangan.

Di dalam proses penyusunan rencana anggaran serta realisasi anggaran pasti terdapat beberapa kendala atau masalah yang dihadapi dalam suatu instansi. Banyak hal yang menyebabkan adanya permasalahan yang timbul mengenai anggaran yang tidak sesuai dengan realisasinya yaitu dikarenakan beragam faktor berupa perencanaan yang memakan banyak waktu sehingga terjadi keterlambatan dalam

pengesahan dan membuat realisasi anggaran tidak sesuai dengan target awal. Permasalahan proses pelaksanaan anggaran yaitu ketika suatu penyerapan anggaran berbanding terbalik dengan perencanaan anggaran yang disebabkan karena proses alokasi dana anggaran yang telah direncanakan tidak selaras dengan rencana asumsi-asumsi kebijakan anggaran, contohnya yaitu anggaran di luar perencanaan karena terdapat perencanaan baru yang jauh lebih penting dan prioritas, tidak terwujudnya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang sebelumnya rencana pendapatan daerah, pengalokasian belanja, SDM finansial sebelumnya sudah di tetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian yaitu analisis dari laporan keuangan pada Kantor Instansi Kementerian di Jawa Barat yang datanya dapat diolah berdasarkan Laporan Keuangan yang diperoleh dari Divisi Administrasi dan Keuangan, situs resmi suatu Instansi, serta kemampuan pengelolaan dimana datanya didapat dari proses wawancara dengan Kepala Divisi Administrasi di Instansi yang berkaitan. Variabel penelitian yaitu variabel independen yang berdiri secara tunggal yaitu Kinerja Laporan Keuangan suatu Lembaga/Instansi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan detail anggaran pada laporan keuangan di suatu Instansi. Proses penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif yakni proses wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui secara detail anggaran laporan keuangan dalam suatu Instansi.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara terhadap Kepala Bidang Administrasi dan Kepala Bidang Anggaran dan Keuangan pada Instansi di Jawa Barat, kemudian studi literatur terkait topik penelitian mengenai Analisis Laporan Keuangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengingat IKPA menjadi alat untuk mengukur kinerja penggunaan anggaran, maka IKPA harus terus dikaji agar dapat berkembang menjadi alat yang dapat dipercaya, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di masa mendatang, sehingga tidak dibutuhkan lagi alat lain untuk mengukur kinerja penggunaan anggaran (Arnida, 2022). Dengan didasarkan pada hal tersebut, maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh IKPA terhadap pengawasan pengelolaan kinerja Keuangan pada salah satu Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan indikator yang dikembangkan oleh

Kementerian Keuangan untuk mengukur kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran Efektivitas, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan digunakan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran oleh kementerian/lembaga nasional”. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pertama kali diaplikasikan untuk melakukan pengukuran dan pengevaluasian kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga

Kinerja Pelaksanaan Anggaran memiliki banyak aspek dan juga Indikator IKPA yaitu :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Dalam hal ini diperlukan adanya penilaian tentang kesesuaian antara proses pelaksanaan anggaran yang direncanakan dan juga yang telah ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Cara yang diperlukan yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Deviasi adalah salah satu indikator yang memiliki fungsi untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran kementerian/lembaga.

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas adalah pentingnya proses penilaian mengenai patuh atau tidaknya Satker terhadap peraturan-peraturan per-UU yang telah berlaku di bidang pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Kualitas Pelaksanaan Anggaran terdiri dari penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan/hutang, pengelolaan Uang Persediaan dan Uang Tambahan Persediaan, serta Dispensasi SPM (Standar Pelayanan Minimal).

3. Kualitas Hasil Pelaksanaan

Hasil adalah Penilaian akhir terhadap capaian *output* dan penyelesaian pembayaran.

IKPA memiliki tujuan yang sangat penting dalam sebuah Instansi yaitu berfungsi sebagai kelancaran atas pelaksanaan anggaran, IKPA juga memiliki tujuan untuk mendukung manajemen kas, serta meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan dalam suatu Instansi. IKPA digunakan dalam rangka *monitoring* dan evaluasi belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga, dan memberikan penghargaan.

Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 ada 8 indikator yang meliputi<sup>6</sup> :

1. Indikator Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Pengertian atau maksud dari Indikator Revisi DIPA adalah suatu indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur kualitas perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga/Unit Eselon I/Satker sesuai dengan rata-rata rasio revisi DIPA per-3 periode (triwulan).

2. Indikator Deviasi Halaman III DIPA

Maksud dari deviasi Halaman III DIPA adalah suatu indikator kinerja yang

berfungsi untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran sesuai dengan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran pada Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan.

3. Indikator Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah suatu indikator kinerja yang berfungsi untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian /Lembaga /Unit /Eselon I/Satker yang sesuai berdasarkan eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran tiap triwulanan.

4. Indikator Belanja Kontraktual

Belanja Kontraktual memiliki arti Indikator kinerja yang berfungsi untuk mengukur kecepatan waktu penyampaian data-data kontrak dan akselerasi belanja kontraktual pada K/L? Unit Eselon I/Satker.

5. Indikator Penyelesaian Tagihan

Penyelesaian tagihan adalah indikator kinerja yang dimanfaatkan untuk menghitung ketepatan waktu dalam penyampaian SPM LS kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker. Indikator ini dihitung sesuai dengan rasio pada tepat waktunya penyelesaian tagihan.

6. Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan

Uang Persediaan Pengelolaan UP dan TUP adalah indikator kinerja yang dimanfaatkan sebagai alat ukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban UP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya berasal dan sumbernya dari rupiah Murni.

7. Indikator Dispensasi SPM

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan K/L/unit Eselon I/Satker dalam penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran. Dispensasi dihitung dengan cara rasio antara penambahan SPM yang memperoleh dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang sudah dijadwalkan terhadap jumlah SPM yang akan di kirimkan dan disampaikan ke KPPN yang SP2nya diterbitkan pada triwulan IV.

8. Indikator Capaian *Output*

Capaian *output* adalah suatu indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur mengenai ketepatan waktu untuk penyampaian data-data dan tercapainya *output* pada K/L/unit Eselon I/Satker. Capaian dinilai berdasarkan nilai komposit gabungan antara Nilai Kinerja, Komponen Tepat Waktu, dan Komponen Capaian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di dalam Instansi yang bertujuan untuk mengetahui jalannya Laporan Keuangan sebagai

*mentoring* dan evaluasi peran indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dalam suatu Instansi/Lembaga yang bersangkutan serta apa saja kendala yang dihadapi dalam suatu Instansi tersebut. IKPA sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat untuk mendapatkan penilaian dan pelaksanaan anggaran dalam satu periode.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu Indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai alat ukur yang mutlak dalam menyusun laporan keuangan di dalam suatu Instansi untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran selama periode-periode tertentu yang berisi tentang perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan realisasi anggaran. Pada proses kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran suatu Instansi/ Kementerian Lembaga membuat capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran yang akan dicapai oleh Satuan Kerja/Kementerian Lembaga setiap periode. Capaian target yang telah disepakati disimpan dan digunakan sebagai komponen tambahan penilaian IKPA atau *reward* khusus pada Satker yang bersangkutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Addink, H. (2019). *Good Governance: Concept and Context*. Oxford: Oxford University Press.
- Arnida, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i1.1087>
- Bayu Santosa, A. & A. R. (2021). *Accounting and Business Information System Journal*. 9.
- Eskandar. (2022). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 12.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hartandi, W. (2022). *Analisis Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II Tahun Anggaran 2018-2020. Tugas Akhir*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Henk Addink. (2019). *GOOD GOVERNANCE: CONCEPT AND CONTEXT*. United States of America by Oxford University Press 198 Madison Avenue.
- Keuangan, K., & Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka, K. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung Arnida Arnida. 4(1). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i1>
- Kuntadi, C., & Cheria Puspita, G. (n.d.). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga: Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi dan Faktor Individual. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2>

- Kuntadi, C., & Puspita, G. C. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga: Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi dan Faktor Individual. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2), 189–198. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2.1220>
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik .
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir, S. (2007). Analisa Laporan Keuangan (4 ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Orniati, Y. (2009). Laporan Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(3).
- Perpajakan dan Keuangan Publik, J., Sri Rahayu, Y., Ahmil Kautsar, W., Kunci, K., & Reformulasi, K. (2022). Analisa Reformulasi IKPA terhadap Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Kementerian Agama.
- Rahayu, Y. S., & Kautsar, W. A. (2023). Analisa Reformulasi IKPA terhadap Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Kementerian Agama. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(1), 1–12.
- Ramadhan, R. S. (2014). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Rotberg, R. I. (2014). Good Governance Means Performance and Results. *Governance*, 27(3), 511–518. <https://doi.org/10.1111/gove.12084>
- Rotberg, R. I. (2014). Good Governance Means Performance and Results. *Governance*, 27(3), 511–518. <https://doi.org/10.1111/gove.12084>
- Subramanyam, K. R. (2014). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmadinata, N. S. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suriani, S. (2015). The Effect of Performance-Based Budgeting Implementation towards the Institution Performance Accountability (Case Study: Wajo). *Information Management and Business Review*, 7(4), 6–22. <https://doi.org/10.22610/imbr.v7i4.1158>

- Syahputra, F. (2014). Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Laporan Arus Kas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Undang-Undang No. 17. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
- Yutikawati, E. (2013). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Rakabu Sejahtera di Sragen. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.